

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibu kota saat ini. Jakarta, sebagai Ibu Kota NKRI sekaligus daerah otonom tingkat provinsi, menghadapi berbagai tantangan seperti urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu, Jakarta juga mengalami isu-isu lingkungan yang semakin memburuk, seperti banjir dan penurunan permukaan tanah, yang semakin memperkuat urgensi pemindahan ibu kota.

Gagasan pemindahan ini diletakkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menetapkan berbagai aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, hingga sumber keuangan. Undang-undang ini mencerminkan penerapan prinsip negara hukum di Indonesia, di mana setiap langkah pemindahan harus melalui aturan dan mekanisme yang berlaku, serta melibatkan partisipasi publik. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

1.2. Saran

Dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek ini. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Meskipun UU IKN telah menetapkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, penting untuk memperluas dan memperdalam partisipasi tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berupa konsultasi dan sosialisasi, tetapi juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
2. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur di IKN harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

3. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai sektor ekonomi yang berkembang di ibu kota baru.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi potensi konflik sosial antara masyarakat asli dan pendatang, serta meminimalkan kesenjangan sosial yang mungkin timbul. Penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui program-program pemberdayaan dan integrasi sosial antara pendatang dan penduduk asli perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif dalam proses pemindahan IKN, diharapkan proyek ini tidak hanya berhasil dari segi pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.